

STUDI EKSPANATIF PERGESERAN FOKUS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA KEPEMIMPINAN BARACK OBAMA DARI TIMUR TENGAH KE ASIA PASIFIK DALAM TEORI SEKURITISASI

Gading Bagus Prakasa

Universitas Abdurrah (10 pt)

Gadingbagusprakasa17@student.univrab.ac.id

Abstrak

Sejak menjabatnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di tingkat Internasional yang sebelumnya berfokus pada Timur Tengah bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan *Pivot to Asia* yang merupakan istilah untuk strategi yang menekankan pada kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menjelaskan, serta memberikan analisis atas perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan teori *securitization* dan konsep *speech act* yang diperkenalkan oleh *Copenhagen School* ditemukan bahwa perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini disebabkan oleh kebiasaan atau budaya China dalam melakukan bisnis, yang sebenarnya merupakan hal yang bersifat non-keamanan namun di bentuk menjadi masalah keamanan oleh Amerika Serikat. Pergeseran fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini kemudian menciptakan dilemma keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Kata kunci: Amerika Serikat, Kebijakan Luar Negeri, China, Keamanan, Sekuritisasi.

PENDAHULUAN

Amerika Serikat (AS) muncul sebagai satu-satunya tokoh kekuatan dunia di

akhir Perang Dingin. Karena itu, Amerika telah mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik militernya. Termasuk bagaimana Amerika Serikat tampil di mata negara- negara lain di dunia dengan kehadiran militernya. Kebijakan luar negeri A.S. semakin diterapkan ribuan, jika tidak puluhan ribu, mil dari rumah sehingga pasukan dan upaya untuk membangun pangkalan militer permanen dapat mendukung pengaruh dan operasi militer Amerika. Sebagai bagian dari konsep sekuritisasi yang berfungsi untuk menghadapi kekuatan Uni Soviet dan sekutunya selama perang dingin, kebijakan penempatan pangkalan militer merupakan variabel penting dalam strategi pertahanan AS.

Sejak awal proses transisi demokrasi di Eropa dan Timur Tengah (Afghanistan dan Irak), Amerika Serikat telah mengurangi pengeluaran militer sebesar USD 487 miliar, dan sebagai hasilnya, lebih sedikit tentara yang ditempatkan di sana. Ini telah membebaskan sumber daya yang telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan AS di Pasifik. Di tengah penurunan pengeluaran militer AS, wilayah di mana kepentingan AS berada dalam risiko telah diangkat ke puncak agenda para pembuat keputusan. Saul Bernard Cohen menjelaskan geopolitik dalam bukunya yang berjudul *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2003) bahwa geopolitik adalah studi tentang bagaimana faktor geografis dan pandangan dunia mempengaruhi politik nasional dan internasional. Fitur dan pola geologis, serta area berlapis yang mereka buat, membentuk skenario ini. Kekuatan di tingkat internasional dan domestik adalah bagian dari proses politik yang membentuk perilaku internasional. Proses politik dan fitur geografis keduanya berubah dan berinteraksi satu sama lain.

Berbeda dengan Geopolitik, Geoekonomi menekankan pada aspek kesalingterikatan perdagangan dan potensi ekonomi, hubungan politik dan internasional yang lebih luas, dan pengejaran kepentingan strategis oleh suatu negara melalui kemampuan militer. Meningkatnya bobot pertimbangan ekonomi dalam negosiasi diplomatik adalah inspirasi utama untuk strategi ini (Asher, 2011). Menurut (Goswami, 2013), bidang geoekonomi mengkaji bagaimana perekonomian di seluruh dunia berinteraksi. Ini adalah penyelidikan ilmiah tentang

dinamika modal, pasar, dan pekerja yang saling berhubungan di seluruh dunia. Dengan kata lain, konsep Geoekonomi mempengaruhi kebijakan masing-masing negara dalam hal perdagangan dan perdagangan internasional melalui interaksi dengan karakteristik geografis dan demografis negara-negara tersebut.

Amerika Serikat telah memilih Barack Obama sebagai presidennya yang ke-44, menjadikannya pewaris bangsa yang sedang terpuruk sebagai negara adidaya global. Obama menjabat pada Januari 2009. Ketika Obama menjabat, Amerika Serikat sudah terhuyung-huyung dari dampak perang bertahun-tahun terhadap rakyat dan ekonominya. Sikap kebijakan luar negeri utama Obama adalah bahwa perjalanan Bush ke Irak telah mengalihkan perhatian dari ancaman nyata di Afghanistan, yang seharusnya menjadi prioritas utama, dan bahwa Obama berdedikasi untuk mengakhiri perang Irak, yang secara luas diyakini telah menghancurkan koalisi internasional. Amerika Serikat sangat membutuhkan untuk memenangkan perang ini. Mengacu pada apa yang dia lakukan.

Ketika tiba saatnya untuk menyelesaikan kasus Irak, Obama mengadopsi kebijakan Bush tentang strategi penarikan pasukan secara bertahap, meskipun ia mengakui bahwa hal itu perlu dimodifikasi berdasarkan perkembangan keamanan dan lanskap politik negara tersebut (Khan 2011). Lebih banyak pasukan AS, lebih banyak operasi, dan lebih banyak serangan lintas batas yang metodis sedang dalam perjalanan ke Afghanistan, seperti yang telah dijanjikan Obama secara terbuka dan berulang kali. Amerika Serikat tidak dalam posisi yang kuat pada akhir tahun 2010 untuk mencapai tujuannya di Afghanistan, terbukti dengan strategi Obama untuk mengurangi pasukan di Afghanistan sejak Juli 2011.

Praktek Geopolitik dan Geoekonomi contohnya dapat kita lihat dikawasan Timur Tengah. Friedrich Ratzel menyebut kawasan Timur Tengah sebagai *World Island* karena kaya akan minyak, gas, dan mineral. Kekayaan alam serta kondisi geografisnya yang terletak tidak jauh dari jalur sutera membuat kawasan itu menjadi kawasan yang sangat spesial bagi perekonomian dunia. Terdapat beberapa aktor yang selalu aktif dalam aktifitas Geopolitik dan Geoekonomi Timur

Tengah, salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara dengan kapasitas kekuatan yang besar setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya UniSoviet.

Amerika Serikat lahir sebagai *pioneer* kemajuan sebuah bangsa yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia internasional dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Namun, semakin majunya sebuah bangsa maka kebutuhan akan sumber daya akan semakin bertambah, hal ini tentu juga berlaku pada Amerika Serikat. Tingginya kemajuan teknologi dan industri Amerika Serikat membuat tingkat konsumsi energinya juga ikut melambung tinggi. Salah satu pemasok energi paling efisien saat ini adalah minyak bumi yang dikategorikan sebagai “energi primer”. Minyak bumi diolah untuk memproduksi bahan bakar mulai dari bensin, diesel, avtur, dan lain sebagainya. Pada tahun 2000 saja tingkat konsumsi Amerika Serikat terhadap minyak mencapai 19 juta barel per hari (CEIC Data, 2021), dengan tingkat produksi minyaknya hanya 5,8 ribu barel per hari (*U.S. Energy Information Administration, 2021*). Jauhnya *gap* antara produksi dan konsumsi minyak memaksa Amerika Serikat melakukan impor (atau dalam hal ini, mengakuisisi) minyak dari negara lain, salah satunya kawasan Timur Tengah.

Malangnya, kondisi kawasan Timur Tengah tidak selalu kondusif, selalu ada konflik yang terjadi. Konflik perbatasan antara Palestina dengan Israel, konflik antara Iran dengan Iraq, dan adanya jaringan terorisme Al-Qaeda yang mempengaruhi perdagangan persenjataan merupakan contoh kecil dari banyaknya permasalahan yang ada di Timur Tengah. Kondisi Geopolitik dan Geoekonomi kawasan Timur Tengah ditambah dengan *struggle of power*nya Amerika Serikat, menjadi *behavior*

drive negara paman sam tersebut untuk mengarahkan fokus kebijakan luar negerinya ke Timur Tengah. Hal ini diperkuat dengan argumen Noam Chomsky. Dalam pidato perkuliahannya di UNESCO Palace, Beirut, Lebanon pada 25 Mei 2010, ia mengatakan bahwa kondisi geografis kawasan Timur Tengah yang sangat krusial bagi ekonomi dunia serta tingginya dominasi dan pengaruh Amerika Serikat jika dilihat secara empirik, menjadikan alasan Amerika Serikat memberikan fokus lebih kebijakan luar negerinya ke kawasan Timur Tengah.

“...Para perencana di Departemen Luar Negeri Presiden Roosevelt dan Dewan Luar Negeri merencanakan dunia pasca perang, sebuah dunia di mana AS akan menjadi kekuatan dominan. Konsep utama yang mereka kembangkan konsep apa yang mereka sebut Area Grand. Area ini akan mencakup belahan bumi Barat termasuk sumber daya energi Timur Tengah. Dapat dipahami bahwa Timur Tengah sumber daya minyak sangat penting untuk kontrol dunia. Salah satu perencana terkemuka menunjukkan bahwa kontrol atas minyak Timur Tengah akan menghasilkan kontrol yang besar atas dunia. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan dalam mengendalikan minyak Timur Tengah” (Chomsky, 2010).

Amerika Serikat kemudian melakukan serangkaian intervensi politik dikawasan Timur Tengah. Di bidang ekonomi, Amerika Serikat berhasil menyebarkan paham ekonomi kapitalisme dan liberal. Di bidang Militer, Amerika berhasil membuat kebijakan *security assistance*, yang berujung pada terbentuknya pangkalan dan fasilitas militer untuk menjaga keamanan kawasan Timur Tengah. Di bidang politik, kebijakan luar negeri Amerika berhasil memodifikasi struktur politik

sebagian besar negara Timur Tengah untuk memberi ruang bagi demokrasi. Kemajuan kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah dapat ditelusuri kembali ke keberhasilan politik luar negeri AS di bidang ekonomi, militer, dan demokrasi politik.

STUDI LITERATUR

Kajian terdahulu merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum peneliti. Kajian terdahulu memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti namun, memiliki perbedaan dalam perspektif penelitian yang bertujuan membantu keberlangsungan penelitian serta memposisikan penelitian peneliti sehingga dapat menunjukkan keorisinalitasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil enam penelitian terdahulu yang terdiri dari jurnal, skripsi dan penelitian yang telah dibukukan.

Penelitian pertama berjudul *Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik* oleh Vanilla Planifolia. Laporan ini merinci mengapa Amerika Serikat mengalihkan penekanan kebijakan luar negerinya dari Timur Tengah ke Asia- Pasifik. Dengan kekuatan nasionalnya yang semakin besar, Cina memainkan peran yang semakin signifikan dalam dinamika regional. Sekutu AS di kawasan Asia- Pasifik memandang kekuatan nasional China yang tumbuh sebagai ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional mereka sendiri. Strategi penyeimbangan kembali ini juga mencakup inisiatif Amerika Serikat untuk mengatasi dugaan pengabaian pemerintahan Bush terhadap kawasan Asia-Pasifik. Ada perasaan luas di antara para pemimpin Asia Tenggara bahwa mereka telah diabaikan oleh Amerika Serikat pada tahun-tahun sebelum Obama menjabat. Karena Amerika Serikat telah memberikan

sumber daya militer yang substansial ke Irak dan Afghanistan sebagai bagian dari kebijakan Perang Melawan Terornya, setiap strategi penyeimbangan kembali yang bertujuan untuk mengalihkan fokus itu kembali ke kawasan akan menghadapi tantangan yang signifikan (Vanilla, 2017). Istilah "kawasan Asia-Pasifik" dipilih agar tidak otomatis dianggap bahwa Amerika Serikat telah berhenti memperhatikan belahan dunia lainnya. Data sekunder dari sumber seperti Departemen Pertahanan AS, Departemen Hubungan Luar Negeri AS, serta sejumlah jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lainnya, digunakan. Menggunakan teori *Balance of Threat* sebagai kerangka analisis, Vanilla menemukan bahwa perluasan kemampuan nasional China sangat berkorelasi dengan strategi *rebalancing* Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Aliansi militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia-Pasifik telah diperkuat sebagai bagian dari strategi *rebalancing*. Vanilla menjelaskan dengan mengatakan Amerika Serikat sekarang memiliki opsi strategis untuk menyeimbangkan upaya atau bergabung. Pembuat kebijakan AS telah menanggapi kebangkitan China dengan membentuk aliansi militer, yang disebut "strategi *balancing*" *strong states vs weak states, availability of alliance*, serta *peace and war condition* sesuai dengan teori *Balance of Threat* (Vanilla, 2017).

Penelitian selanjutnya berjudul *Containment Amerika Serikat terhadap Fenomena Rise of China dalam Perspektif Hegemoni Realisme* oleh Ary Arseno, Untuk melawan kebangkitan Cina, Amerika Serikat menggunakan strategi "*containment*", yang dibahas dalam makalah ini. Setelah Perang Dunia II, Cina membangun kembali dan tumbuh menjadi negara adidaya yang dapat menantang

posisi tak terbantahkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat menggunakan *containment* sebagai alat untuk mempertahankan posisi dominannya dalam tatanan global. Semua informasi yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku dan majalah. Dengan mengacu pada teori realisme ofensif John Mearsheimer, Ary memberikan penjelasan tentang strategi *containment*. Temuan studi menunjukkan bahwa Washington berusaha untuk mengepung China dengan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Taiwan, bahkan India dan negara-negara Asia Barat dan Tengah lainnya. "Pengepungan" AS adalah upaya untuk membatasi kebebasan bergerak dan pengaruh China atas negara-negara mikro Asia (Ary, 2019). Amerika Serikat berharap bahwa negara-negara Asia yang membentuk aliansi dapat menjadi perpanjangan kekuatan Amerika dan musuh Cina sebagai kekuatan besar. Menurut Ary, Amerika Serikat melakukan semua itu agar China tidak menjadi negara adidaya regional. Jika China menjadi hegemon, status Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya dunia akan terancam. Jika Amerika Serikat berhasil mencegah China menjadi kekuatan dominan di Asia, maka tidak akan ada bandingannya di kawasan dan dapat mempertahankan status hegemoniknya meskipun terletak di belahan timur dunia yang lebih lemah.

Penelitian ketiga datang dari sebuah penelitian berjudul *China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik* oleh M Najeri Al Syahrin, tulisan ini menjelaskan pentingnya persaingan keamanan antara dua ekonomi terkemuka dunia di kawasan Asia-Pasifik. Kebangkitan China

telah membuat hubungan AS-China penting untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di kawasan Asia-Pasifik. Kehadiran China di kawasan memberikan dialog keamanan Asia-Pasifik pilihan lain. Semua informasi yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku dan majalah. Untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, Najeri menggunakan bahasa rivalitas keamanan, yang kemudian dikonseptualisasikan secara "sempit" dalam lingkup regional. Persaingan politik dan keamanan yang berujung pada berakhirnya Perang Dingin tidak serta merta mengubah Amerika Serikat menjadi negara adidaya global yang mampu "sendirian" menguasai dunia. Menurut Najeri, kehadiran China telah memberikan interaksi keamanan kawasan yang lebih beragam. Menandakan perilaku yang bertanggung jawab, Strategi *New Type of Great Power Relations* China dan Asia yang Harmonis telah diterima dengan baik. Amerika Serikat sekarang menghadapi persaingan dari Cina di bidang ekonomi dan perdagangan karena status baru Cina sebagai kekuatan utama. Persaingan keamanan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki banyak persamaan, tetapi pola hubungan ini berbeda. Terkait keamanan regional, Amerika Serikat dan China harus terus mencari cara agar kemitraan strategis mereka tidak berdampak negatif.

Penelitian keempat berjudul *Kepentingan Amerika Serikat di Asia-Pasifik* oleh Poltak Partogi Nainggolan, tulisan ini menjelaskan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Asia-Pasifik serta menjabarkan apa saja kepentingan tersebut menggunakan konsep kepentingan nasional. Makalah ini adalah produk dari studi yang lebih besar tentang pergeseran baru-baru ini dalam fokus kebijakan keamanan AS di wilayah

tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis-analitis. Lapornya mempresentasikan dan membahas temuan riset kepustakaan dan informasi yang diperoleh dari berbagai wawancara mendalam. Analisis atas berbagai temuan merupakan bagian dari informasi yang dipresentasikan dalam laporan penelitian akhir yang utuh. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Provinsi Papua, provinsi tempat berlokasi perusahaan tambang milik AS yang sangat bermasalah, yakni PT Freeport. Provinsi ini dewasa ini memperoleh perhatian pemerintah AS, dan letaknya tidak jauh jaraknya dari Darwin, Northern Territory, Australia, yakni basis penempatan pasukan marinir AS. Provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, yang juga letaknya tidak jauh dari Darwin, yang memiliki perusahaan tambang milik AS yang sering dilanda aksi unjuk rasa. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan teknik wawancara mendalam melalui kunjungan ke lapangan (*field research*). Wawancara mendalam (*In-depth interview*) secara terbuka dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan tugas pokok dalam masalah pertahanan-keamanan di matra laut, udara, dan darat, seperti Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD). Data tertulis (dokumen) di *cross-check* dengan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam. Teknik kualitatif digunakan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya, setelah melalui pembahasan yang mendalam, dibuat kesimpulan dan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kepentingan nasional AS dan pergeseran fokus kebijakan keamanan AS di kawasan Asia-Pasifik Dengan penempatan pasukan marinirnya di Darwin dan

manuver kapalkapal perangnya yang semakin intens, paling tidak AS ingin memperlihatkan kehadiran angkatan perangnya secara nyata dan jelas di kawasan Asia-Pasifik. Bentuk kehadiran secara nyata dan jelas militer AS di kawasan ini tentu saja akan membuat RRC perlu berhati-hati dalam memperlihatkan agresifitas militernya di kawasan, khususnya terhadap negara-negara kecil yang bersandar pada perlindungan AS. Sedangkan kedekatan hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan SBY mempengaruhi sikap pasifnya dalam merespons perkembangan lingkungan strategis, khususnya penempatan pasukan mariner AS di Darwin, Australia, yang tidak jauh letaknya dari (perbatasan terluar) Indonesia.

Penelitian selanjutnya berjudul *Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat* oleh Angga Nurdin Rachmat. Makalah ini menganalisis persaingan kekuatan maritim China dan Amerika Serikat dan menjelaskan bagaimana hal itu telah mengubah lanskap keamanan regional di Asia-Pasifik. Angga menggunakan strategi yang mirip dengan yang dilakukan Barry Buzan, yakni konsep *security complex*. Ketika kepentingan bersama ada, kompleks keamanan muncul, dengan semua karakteristik saling ketergantungan persaingan. Semua informasi yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku dan majalah. Menanggapi meningkatnya ambisi China untuk mendominasi kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat telah memutuskan untuk membentuk poros diplomatik dan militer di kawasan tersebut, dan keputusan ini telah dibuat jelas bagi Beijing pada khususnya. Amerika Serikat memiliki dua prioritas utama dalam konflik Laut Cina Selatan: akses dan stabilitas. Untuk memulai, Amerika Serikat memiliki

kepentingan dalam memastikan bahwa kapal dapat dengan bebas melewati perairan teritorial LCS. Menurut pemerintah Amerika Serikat, semua negara harus memiliki dan pada akhirnya mencapai kebebasan maritim yang luas, termasuk kebebasan navigasi. Selanjutnya, Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam membangun perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara.

Angga menyimpulkan Kawasan Asia-Pasifik kini menjadi medan pertempuran bagi Amerika Serikat dan China untuk menunjukkan kehebatan maritim mereka kepada dunia. Cina adalah *the new emerging maritime power*, sedangkan Amerika Serikat adalah *establish maritime power*. Dengan perkembangan militer China yang berfokus pada pembangunan Angkatan Laut menuju *Blue Waters Navy*, persaingan kekuatan maritim telah menjadi warna dalam dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam satu dekade terakhir. Menanggapi kekuatan militer China yang semakin meningkat, Amerika Serikat telah mengalihkan prioritas angkatan lautnya kembali ke Pasifik. Mempelajari persaingan supremasi maritim antara China dan Amerika Serikat sangat penting untuk memahami masa depan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, tetapi ini tidak menghalangi munculnya aktor-aktor baru yang akan menjiwai dinamika tersebut.

Penelitian keenam datang dari sebuah tulisan berjudul *U.S Rebalance Toward Asia dalam Kebijakan Perdagangan di Trans Pacific Partnership (TPP) Pada Era Presiden Barack Obama* oleh Aditya Very Cleverina. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa rasionalitas Amerika Serikat sebagai anggota TPP sebagai manifestasi dari strategi *rebalancing* nya di Asia. Aditya menggunakan

konsep kepentingan dengan perspektif neoliberalisme dan regionalisme. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data didapat dari sumber pihak pertama dan kedua. Wawancara email dengan Carlos A. Kuriyama, Analis Senior APEC untuk TPP; Dea Pradana, staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri; dan Cathleen Cimino-Isaacs, Rekan Peneliti di *Peterson Institute for International Economics*.

Tulisan ini menyimpulkan alih-alih menjadi penghalang bagi sistem FTA yang ada, TPP dapat berfungsi sebagai model regionalisme terbuka dan batu loncatan menuju liberalisasi perdagangan multilateral di Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat TPP sebagai organisasi kerja sama yang dapat menyatukan negara-negara kawasan Asia-Pasifik di bawah kerangka ekonomi bersama. Istilah "*Rebalance toward Asia*" mengacu pada strategi Amerika Serikat untuk mengalihkan fokus politik dan ekonominya ke Asia dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi kawasan yang pesat. Akibatnya, alasan TPP untuk penyeimbangan kembali AS terhadap Asia dalam kebijakan perdagangan diharapkan secara langsung membantu meningkatkan lapangan kerja dan ekonomi di AS setelah krisis, dan dapat memberikan stabilitas dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, tumbuhnya legitimasi TPP sebagai alat ekonomi memberi Amerika Serikat kesempatan untuk melawan kekuatan China yang meningkat di kawasan Asia-Pasifik.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian ini, yang berarti bahwa informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kelompok fokus, analisis dokumen, dan observasi langsung. Metode kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, menyeluruh, dan holistik tentang kata-kata dan perbuatan seseorang, kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam setting tertentu. Tujuan menyeluruh dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami realitas sosial melalui mata partisipan studi (Bogdan & Biklen, 1992: 22).

PEMBAHASAN

Politik luar negeri adalah kebijakan sebuah negara memanipulasi lingkungan internasional berupa sistem perimbangan kekuasaan antar negara, keputusan organisasi internasional, ataupun proses produksi perusahaan internasional untuk mencapai kepentingannya berupa kekuasaan. Hal ini terlihat bagaimana Amerika Serikat sebagai Negara Superpower mengintervensi lingkungan internasionalnya dengan sejumlah kebijakan luar negeri. Sejak akhir 2011, pergeseran kebijakan Amerika Serikat (AS) ke kawasan Asia-Pasifik semakin nyata. Sementara Presiden Obama telah menekankan kebijakan di Timur Tengah dan Eropa, dia telah menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan kembali ke wilayah tersebut, pergeseran ini juga dikenal dengan *ASIA PIVOT* atau Poros Asia.

Selama masa kepresidenan Obama, Amerika Serikat mengambil langkah strategis melawan China dengan mengalihkan fokusnya ke Asia Timur (dikenal sebagai "Pivot"). Beberapa fitur yang menentukan dari kebijakan ini adalah fokus pada aliansi tradisional serta aliansi keamanan baru dengan negara-negara Asia Timur, dan penekanan umum pada kerjasama strategis yang luas dengan negara-negara ini (Ross 2013). India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, serta negara-negara lain di Asia, semuanya telah meningkatkan kerja sama mereka dengan Amerika dalam beberapa tahun terakhir (Goldberg 2016).

Gambar 3 Amerika di Asia Pasifik



Sumber: Japan-Forward.com

Menurut Hillary Clinton (2011), Amerika Serikat perlu membuat poros ini untuk memastikan peningkatan investasi yang cukup besar selama dekade mendatang. Melalui kerja sama langsung dengan negara-negara di sekitar Tiongkok, Pivot Asia Timur berharap untuk membatasi penyebaran pengaruh Tiongkok secara geografis melalui kombinasi kerja sama bilateral dan budaya (Shambaugh 2013). Strategi Pivot Asia Timur pemerintahan Obama menandakan awal yang menjanjikan bagi upaya Amerika untuk mengimbangi kebangkitan China dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara di Indocina dan di semenanjung Korea. East Asia Pivot bertujuan, sebagian, untuk mempertahankan keadaan "terpecah" di kawasan Asia Timur (Ross 2013). Banyak orang melihat kesamaan antara kebijakan Obama dan Amerika Serikat selama Perang Dingin, ketika Washington mempraktikkan

containment Uni Soviet mengenai paham komunisme dan liberalism kala itu (Gardels

2018; Saetren 2018). Namun, terlepas dari kebangkitan Cina dan kekuatan baru lainnya, Amerika Serikat masih memegang kendali (Saetren 2018). Dalam hal sekutu Asia Timur, Jepang telah menjadi mitra Amerika Serikat yang paling dapat diandalkan. Sehubungan dengan kebangkitan Cina, Hughes (2009) berpendapat bahwa Amerika Serikat dan Jepang terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini karena Jepang khawatir kebangkitan China akan mengurangi pengaruh Jepang di seluruh dunia, terutama di Asia. Selain itu, China telah menjadi ancaman jangka panjang yang dapat mengancam kepentingan negara-negara Asia Timur, khususnya Jepang (Hughes 2009). Peningkatan 46% berikutnya dalam anggaran militer Jepang juga tidak mengejutkan (Mastro 2015). Kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang penting bagi Amerika Serikat karena berbagai alasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasukan Amerika dapat ditempatkan di Jepang sangat dekat dengan daratan Cina (Mastro 2015). Kurangnya persahabatan antara Jepang dan Cina dapat ditelusuri kembali

ke era setelah pendudukan Jepang di Cina dalam Perang Dunia II. Amerika Serikat kemudian dapat lebih mudah menggunakan Jepang sebagai pangkalan militer (Khoo 2014).

Pergeseran konsentrasi yang awalnya berada di kawasan timur-tengah ke Asia-Pasifik terlihat tidak relevan apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang dicetuskan oleh AS pada masa kepemimpinan Presiden Bush tahun

2001 yakni implementasi *war on terrorism*, memfokuskan kawasan Timur-Tengah dan menjadikan kawasan selain Timur-Tengah seperti Asia-Pasifik sebagai *Second Front* atau kawasan dengan tingkat prioritas kedua. Berkaitan dengan status *Second Front* tersebut, memasuki tahun 2009 status tersebut disinyalir mengalami perubahan disaat berbagai implementasi dari perubahan kebijakan mulai tampak dikawasan Asia.

Northern Territory Australia, termasuk kota Darwin, menyambut Presiden AS yang sedang menjabat untuk pertama kalinya. Kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik diumumkan saat kunjungan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011. Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard telah mengumumkan pengerahan 2.500 Marinir Amerika Serikat ke pangkalan militer Australia di Darwin, untuk ditempatkan di barak Robertson. Marinir diharapkan untuk menanggapi dengan cepat masalah kemanusiaan dan keamanan di Asia Pasifik. Untuk merespons bencana alam di kawasan dengan lebih baik, Amerika Serikat kini dapat meningkatkan kesiapannya untuk menggelar operasi tanggap darurat. Pada pertengahan 2012, 200 hingga 250 Marinir Amerika Serikat telah dikerahkan. Mereka akan bergiliran melayani selama enam bulan. Pengerahan dan penarikan lebih sering dari Marinir AS di Northern Territory direncanakan.

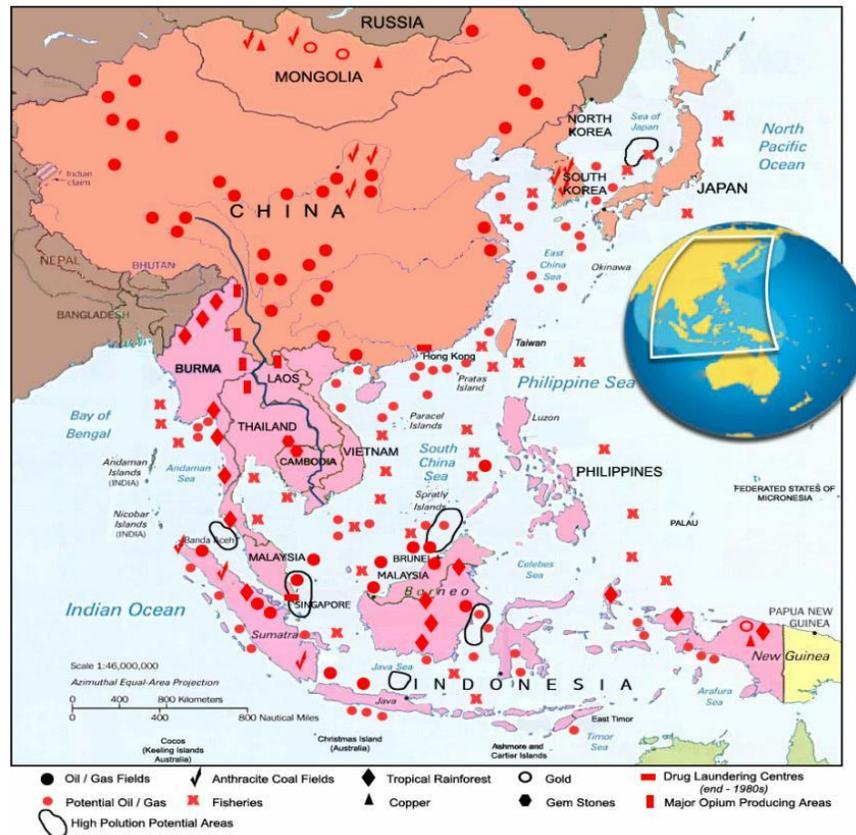
4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pergeseran

Terdapat sejumlah alasan mengapa AS yang berada dibawah kepemimpinan

Presiden Obama menggeser kebijakan dan *interest* nya ke mega regional Asia-Pasifik setelah sebelumnya AS lebih focus ke Timur Tengah, Peneliti akan mendeskripsikan hal tersebut melalui sub bab dibawah ini.

4.1.1 Peluang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Gambar 4 Sumber Daya Alam Asia Pasifik



Sumber: Clevo Wilsen dan Clem Tisdell (2003)

Temuan studi kepustakaan memperlihatkan, Presiden Obama dengan perubahan, atau Kebijakan keamanan AS bergeser untuk lebih fokus pada kawasan Asia-Pasifik dalam upaya untuk mengimbangi pengaruh China yang berkembang di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan adalah sumber ketegangan di Asia-Pasifik karena merupakan rumah bagi beberapa cadangan minyak dan gas alam yang paling menjanjikan di dunia. 213 miliar barel minyak yang diklaim China telah

ditemukan di sana kira-kira 10 kali lipat dari total cadangan minyak Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan dapat menghasilkan minyak sebanyak cadangan minyak Qatar, atau 28 miliar barel, dan gas alam sebanyak cadangan minyak Qatar, atau 900 triliun kaki kubik.

Selanjutnya, setengah dari armada dagang dunia yang besar melewati jalur perairan ini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan nilai perdagangan sebesar US\$ 5 triliun setiap tahunnya. Selat Malaka, yang menjadi penghubung Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, juga sangat penting artinya di kawasan Asia-Pasifik. Melalui selat ini, terdapat sekitar 400 kapal yang lewat setiap hari, terutama kapal-kapal niaga dan logistik. Di lain sisi, AS memiliki kepentingan mengamankan transportasi logistik untuk komoditas minyak dan banyak komoditi lainnya via Selat Malaka. Seperti dijelaskan Komandan Komando Pasifik AS, Laksamana Robert F. Willard, kepentingan realistik AS atas Laut Cina Selatan dapat dilihat dari eksistensi kawasan itu, yang nilai jalur lautnya untuk perdagangan bilateral setiap tahun bernilai US\$ 5,3 triliun, yang sebesar US\$ 1,2 triliun secara langsung terkait kepentingan AS.

Kemudian, AS memiliki kepentingan terkait implementasi proyek *Coral*

Triangle Initiative (CTI), yang wilayahnya merupakan kawasan segitiga SDA seluas

75 ribu km², meliputi 6 negara di Asia Pasifik, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, dan Papua Nuigini. Jika dicermati, agendanya ternyata tidak semata untuk membuka peluang konservasi kawasan laut penyerap karbon (*conserving coastal carbon sinks*), tetapi juga untuk bisnis di bidang pariwisata, pengolahan ikan tuna, dan investasi berbasis SDA kelautan dan perikanan, serta minyak dan gas bumi.

Di kawasan ini terdapat berbagai perusahaan multinasional yang selama ini telah mengincar peluang investasi, dengan ikut aktif dalam berbagai agenda pertemuan CTI, termasuk perusahaan minyak asal AS, yaitu Exxon Mobile Exploration dan Anova Food LLC, yang terkenal dengan bisnis ikan bersiripnya, khususnya tuna. Pemerintah AS juga selama ini telah mendukung pendanaan regional exchange program CTI di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Anambas, Natuna, Berau, Selat Makasar, Wakatobi, Nusa Penida, Laut Sawu, Bird Head Seascape, Raja Ampat, West Kei, Bali, dan Padaido.

4.1.2 Status Quo yang Terancam

Perlu diperhatikan pendapat analis militer, pertahanan-keamanan, dan masalah-masalah internasional dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, mengatakan bahwa kepentingan negara-negara di kawasan akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim, begitu pula respons mereka terhadap ancaman keamanan yang muncul. Mengingat kondisi riil dan perkembangan lingkungan strategis yang ada, kepentingan dan respons kebijakan mereka akan terkait dengan perlindungan jalur komunikasi laut (*Sea Lanes of Communication/ SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade/ SLT*), yang keduanya sangat penting bagi perdagangan internasional, jalur pasokan energi, dan perekonomian secara keseluruhan. Bahkan, dimensi maritim tersebut akan menentukan kebijakan keamanan yang diambil, dalam hal pilihan-pilihan strategis untuk memproyeksikan kemampuan mereka, ke luar batas teritorial nasional.

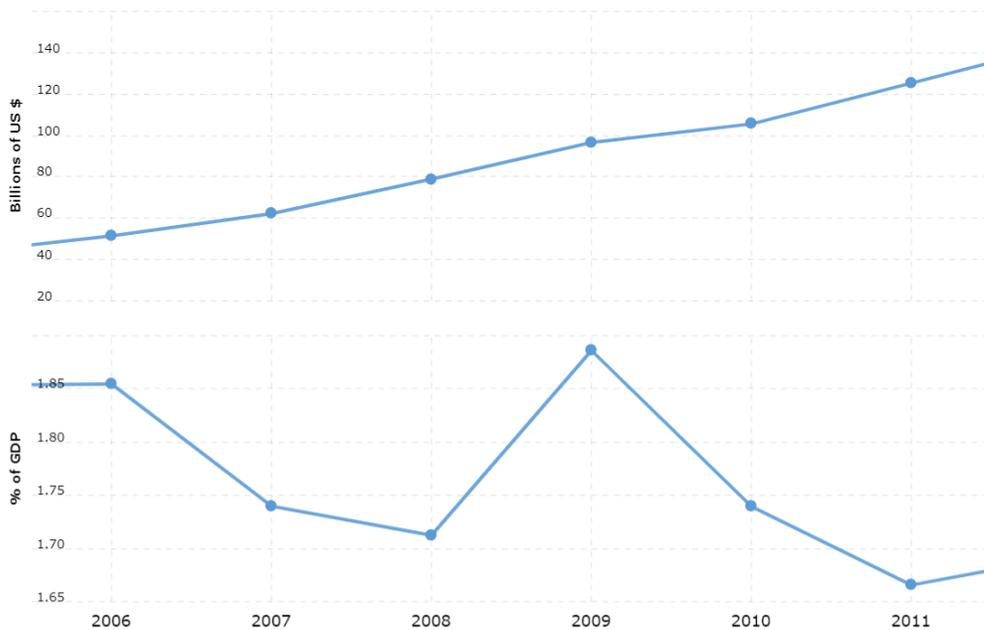
Faktor kedua yang berkontribusi pada kekhawatiran Amerika tentang kebangkitan China ke level hegemoni adalah kepastian China akan membatasi pengaruh Amerika di Asia. Penegasan Mearsheimer (2006) didukung oleh fenomena Amerika Serikat sebagai Hegemon dunia Barat, yang hanya memungkinkan negara-negara lemah seperti Meksiko dan Kanada berkembang di sekitarnya. *Cuban Missile Crisis* tahun 1962, di mana Uni Soviet berusaha untuk menyerang Amerika Serikat secara fisik dengan menempatkan rudal di Kuba, adalah contoh lain dari fenomena ini. Washington menghadapi dilema keamanan sebagai akibat dari kesalahpahaman dan ingin Uni Soviet meninggalkan "halaman belakang" Amerika Serikat (Jervis 2001). Menurut Mearsheimer, hal itu merupakan *tragedy of great power politics*, yang berarti Negara hegemon akan selalu tidak aman jika ada hegemon lain berada disekitarnya (Mearsheimer 2001).

Dengan demikian, dalam sebuah wilayah dengan komponen maritim yang signifikan, di mana perkembangan politik dan militer sangat ditentukan oleh negara mana yang memiliki kemampuan maritim paling kuat. Pada kenyataannya, kawasan Asia-Pasifik telah mengalami perkembangan yang cepat ke arah seperti itu, jauh dari yang semula telah diantisipasi para pengamat. Dapat dikatakan, perkembangan lingkungan strategis di kawasan ini telah sampai pada tahap kompetisi kuat untuk memperebutkan dominasi atas matra laut, sehingga supremasi di laut akan dimiliki. Penguatan militer AS di Asia-Pasifik dapat dilihat dalam konteks ini.

Kepentingan Geopolitik AS mengungkapkan bahwa di sebelah Barat, negara itu berbatasan dengan Lautan Pasifik. Karenanya, di Pasifik, yakni Hawaii, terdapat

pangkalan udara Hickam, yang merupakan basis Pacific Air Force (PACAF), selain di Yokota Jepang, dan Osan Korea Selatan. Adapun PACAF merupakan komando utama AU AS di luar wilayah negeri itu, yang dipimpin jenderal berbintang empat, sarat dengan pengalaman tempur di berbagai periode dan mandala tempur, terutama di Asia Pasifik.

Gambar 5 Graph Peningkatan Belanja Militer China 2006-2011



Sumber: MacroTrends.net

Meningkatnya persepsi ancaman keamanan AS yang datang dari RRC tampak dari peningkatan kontiniu anggaran militer RRC, yang pada tahun 2012 mengalami kenaikan 11,2%, atau sebesar US\$ 100 miliar dibandingkan dengan tahun 2011, sekalipun masih lebih rendah daripada anggaran militer AS, atau dalam posisi terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2011, anggaran belanja militer RRC adalah US\$

125,2 miliar, sedangkan tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar US\$ 105,5 miliar dan US\$ 96,6 miliar.

Peningkatan drastis kian terasa jika dibandingkan dengan anggaran belanja militer tahun 2006, 2007, dan 2008, yang masing-masing baru mencapai, namun terus mengindikasikan peningkatan, US\$ 51,4 miliar, US\$ 62,1 miliar, dan US\$ 78,8 miliar. Secara resmi, di Kongres Parlemen, PM Wen Jiaba mengaitkan ini dengan tujuan peningkatan kemampuan militer negaranya untuk memenangkan apa yang mereka sebut sebagai “perang lokal”. Adapun istilah ini merujuk pada persengketaan wilayah RRC dengan negara-negara tetangganya, terutama di Laut Cina Selatan selama 2 dasawarsa terakhir. Namun, kebutuhan mengawal kepentingan kontinuitas pertumbuhan negara itu yang sangat dinamis di kawasan mendorong pemimpin politik di negeri komunis tersebut membelanjakan miliaran dollar AS untuk peralatan militer modern, termasuk jet tempur siluman versi baru J-20, kapal selam dan kapal induk nuklir, kapal modern yang dipersenjatai rudal supersonik antikapal, rudal balistik antarbenua, misil yang bisa menembak jatuh satelit, dan seluruh kekuatan militer dengan teknologi perang cyber.

Meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan diperlihatkan pasukan yang kian aktif dari pimpinan militer (komando tinggi) AS di lapangan. Sebagai contoh, Pada 10 Februari 2012, Letnan Jenderal (Letjen) Duane Thissen mengambil alih komando Korps Marinir Amerika Serikat di wilayah Asia-Pasifik, melakukan kunjungan ke Markas Komando Brigif II, Cilandak, Jakarta, untuk tujuan mempererat kerja sama militer, terutama di bidang pertahanan kedua negara, dan juga

meningkatkan profesionalisme prajurit marinir kedua negara. Letjen Thissen dalam kunjungannya diterima langsung orang nomor satu di pasukan marinir Indonesia, yaitu Mayor Jenderal (Mayjen) M. Alfian Baharudin, Komandan Korps Marinir (Dankormar). Ketika ditanya pers, Letjen Thiessen menegaskan bahwa keberadaan militer AS di Darwin memiliki dampak positif bagi Indonesia dan kawasan. Ini dapat diartikan, tidak hanya untuk fungsi penanggulangan bencana alam. Sebab, Letjen Thiessen melanjutkan bahwa dengan kehadiran pasukan marinir AS di Australia itu, pasukan kedua Negara dapat berlatih bersama dan meningkatkan kemampuan profesional mereka.

KESIMPULAN (Huruf kapital, Cetak Tebal/Bold, Arial 12, Rata Kiri)

Persaingan antara Amerika Serikat dan China memiliki konsep sekuritisasi yang menarik. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet secara terbuka mengakui 'konflik kepentingan' antara mereka dan satu sama lain di berbagai bidang politik dan ideologi, tetapi itu telah berubah. Kenyataannya, China mengalami hasil yang berbeda. Meskipun Amerika Serikat secara tradisional memandang China sebagai "mitra strategis" untuk tujuan perdagangan internasional dan kerja sama ekonomi, negara itu dipandang sebagai "ancaman" dari perspektif keamanan nasional. Sejak pemerintahan Obama menerapkan kebijakan Asia Pivot, kontradiksi ini semakin terasa.

Dalam kunjungannya keliling Asia Pasifik, Barack Obama sempat memberikan pidato dan kata sambutan di beberapa negara. Obama dalam pidatonya menjelaskan kepada audiens misi dan tujuan Amerika Serikat kedepannya di Asia Pasifik. Menggunakan konsep *speech act* ditemukan bahwa baik disengaja ataupun tidak, Obama sudah melakukan tahap-tahap sekuritisasi pada tiap kesempatan ia melakukan pidato sembari memperkenalkan kebijakan *Pivot to Asia*. Sesuai dengan konsep *speech act* yang dijelaskan oleh *Copenhagen School*, Obama melakukan tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audiens secara simultan. Tahap pemunculan isu dilakukan Obama dengan menjelaskan

permasalahan yang ada di Asia Pasifik serta dampaknya bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Dalam tahap ini Obama sempat sedikit menyinggung tentang persenjataan modern seperti nuklir, yang notabene saat itu China sedang gencar-gencarnya melakukan modernisasi militer mereka termasuk persenjataan berbasis nuklir. Hal ini dibuktikan dengan tidak transparannya China dalam laporan militer tahunannya yang kemudian membuat Amerika Serikat semakin khawatir. Suksesnya tahap meyakinkan audiens dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama politik, ekonomi, hingga militer di titik-titik penting Asia Pasifik seperti Australia, Indonesia, Singapore, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu pada bidang ekonomi, terjalin pula *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang bertujuan untuk membangun ekonomi AS-Asia Pasifik. Menariknya, kerjasama- kerjasama seperti ini terjadi tanpa adanya keterlibatan Cina sebagai negara kuat dikawasan.

Melalui *Pivot to Asia*, Obama menegaskan dalam banyak kesempatan, tidak dimaksudkan untuk membatasi pengaruh China di wilayah tersebut. Dan pemerintah China juga telah berulang kali meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan mengganggu inisiatif Amerika di Asia (Bendini 2016, 16). Pendekatan politik kedua negara jelas berbeda, namun tampaknya 'menyembunyikan' keberadaan perbedaan kepentingan mereka. Paradoks ini juga tercermin dalam bidang kebijakan AS lainnya. Upaya Amerika Serikat untuk membahas masalah Laut China Selatan di forum multilateral KTT ASEAN, serta pengerahan kekuatan militer secara permanen ke Australia, dipandang sebagai upaya untuk "merusak" China. Kontradiksi ini antara lain tercermin dalam upaya memperkuat kekuatan militer lima negara aliansi di kawasan Asia-Pasifik dan dalam upaya merelokasi pangkalan militer di sekitar China. Amerika Serikat mungkin tidak dapat menyangkal bahwa upaya untuk menahan kekuatan China adalah akibat langsung dari strategi China saat ini. Karena strategi penyeimbang paling cocok untuk era Perang Dingin dan tidak tepat jika diterapkan di era milenial, penerapannya di kawasan Asia-Pasifik dinilai terlalu dini. Dalam sistem internasional yang kompleks saat ini, sangat sulit untuk menerapkan blokade ekonomi, strategi pengepungan, militerisasi, atau perlombaan senjata.

Tidak ada negara di kawasan yang menginginkan hal ini terjadi, tetapi tidak ada yang ingin kepentingan China menguasai mereka juga. Tindakan terbaik untuk Amerika Serikat dan Cina, kemudian, tampaknya adalah keterlibatan dan kerja sama dalam isu-isu transnasional (Schmidt 2014, 205-207).

DAFTAR PUSTAKA

Al Syahrin, M Najeri (2018). China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global & Strategis*, Th. 12, No. 1, Januari – Juni 2018.

Acharya, Amitav (2003). *Regionalism and Multilateralism: Essay on Cooperative Security in the Asia Pacific*, Singapura: Eastern University Press.

Arseno, Ary (2019). Containment Amerika Serikat terhadap Fenomena Rise of China dalam Perspektif Hegemoni Realisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XII, No.1, Januari – Juni 2019.

BBC (2011). Barack Obama Says Asia-Pacific is 'top US priority'. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-15715446>.

Bentley, M. and Holland, J. (2013). *Obama's Foreign Policy: Ending the War on Terror*. Routledge.

Bogdan, R., dan Biklen, S (1989). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.

Booth, Ken, 2005. *Critical Security Studies and World Politics*. Boulder, CO:

Lynne

Riener.

Brown, S (2015). *Faces of Power: Constancy and Change in United States Foreign Policy from Truman to Obama*. Columbia University Press.

Bryman A and Bell E. (2015) *Business Research Methods*, Oxford: Oxford University Press.

Buzan, Barry, Waever, Ole & de Wilde, de Jaap (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo: Lynner Rienner.

Buzan, B. & Lemaitre, K.M. (1990). *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post Cold War Era*. Pinter. London.

Buzan, B (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf. Hempstead

Campbell, David (1998). *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity*. Manchester and Minneapolis, MN: University of Minnesota Press/Manchester University Press.

Ciuta, Felix (2009). Security and the Problem of the context: a hermeneutical critique of securitization theory. *Review of International Studies*, 35 (2): 301-326.

Cleverina, Aditya Very (2017). US Rebalance Toward Asia Dalam Kebijakan Perdagangan di Trans Pacific Partnership (TPP) Pada Era Presiden Barack Obama. *Jurnal Skripsi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret*, No. 36, 2017.

Coorey, P (2011). Obama to send marines to Darwin. *The Sydney Morning Herald*,

17 November. Diakses pada 15 Juli 2022, dari <https://www.smh.com.au/national/obama-to-send-marines-to-darwin-20111116-1njd7.html>.

Department of Defense, (2015). *Defense Economic Trends in the Asia-Pacific*.

Canberra. Diakses pada 13 Januari 2022, dari <https://defence.gov.au/dio/publications.shtml>

Dorling P (2011) China determined to rival US arsenal. *Sydney Morning Herald*.

Diakses pada 17 September 2022, dari <https://www.smh.com.au/world/china-determined-to-rival-us-arsenal-20110227-1ba60.html>

Feng, H., He, K., Li, X. (2019). On US–China Relations: Problems and Prospects.

In: *How China Sees the World*. Palgrave Macmillan, Singapore. Diakses pada 15 Mei 2022, dari https://doi.org/10.1007/978-981-15-0482-2_3.

Friedman, G., dan Jacob L. Saphiro (2017). 2 Maps That Show The US' Strategy In Asia-Pacific. *Mauldin Economics*, 14 Februari. Diakses pada 5 Mei 2022, dari <https://www.mauldineconomics.com/editorial/2-maps-that-show-the-us-strategy-in-asia-pacific>.

Goldberg, Jeffrey. 2016. The Obama Doctrine. Diakses pada 17 Maret 2022, dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525>

He, Kai & Feng, Huiyun. (2016). How Can China Rise Peacefully? Information, Commitment, and China's Peaceful Rise Strategies. Researchgate. Diakses pada 17 Agustus 2021, dari https://www.researchgate.net/publication/228122824_How_Can_China_Rise_Peacefully_Information_Commitment_and_China's_Peaceful_Rise_Strategies

Hansen, Lene (2012). Reconstructing desecuritisation: the normativepolitical in the Copenhagen School and directions for how to apply it, Review of International Studies, 38 (3): 525-546.

Information Office of the State Council of The People's Republic of China (2011). China Peaceful Development. Diakses pada 1 April 2021, dari http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7126562.htm.

Katzenstein, Peter (1996). The Culture of National Security. New York: Columbia University Press.

Krause, Keith dan Michael C. Williams (1997). Critical Security Studies. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kristensen, Hans M., dan Robert S. Norris (2011). Chinese nuclear forces, 2011. Bulletin of the Atomic Scientists, Volume 67, Issue 6, November/December 2011, Pages 81-87. Diakses pada 7 Agustus 2022, dari <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0096340211426630>.

Lisna, Violita. (2019). Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Researchgate. Diakses pada 17 Agustus 2021, dari

https://www.researchgate.net/publication/333798258_KEPEMIMPINAN_PRESIDEN_AMERIKA_SERIKAT_BARACK_OBAMA.

Muni, S (2012). Obama Administration's Pivot to Asia-Pacific and India's Role. ISAS Working Paper, 29 Agustus, No. 159. Diakses pada 10 Februari 2022, dari https://www.files.ethz.ch/isn/152376/ISAS_Working_Paper_159_-_Obama%27s_Administrations_31082012100801.pdf.

Nainggolan, Poltak Partogi (2013). Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik. Jurnal Politika Vol. 4, No. 1, Mei 2013.

Noam Chomsky (2010). US Foreign Policy in the Middle East. Diakses pada 28 Maret 2021, dari <https://chomsky.info/20100525/>.

Office of the Press Secretary of The White House (2009). In Tokyo, Our Common Future. Diakses pada 23 Juni 2022, dari <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/11/14/tokyo-our-common-future>

Office of the Press Secretary of The White House (2011). Remarks By President Obama to the Australian Parliament. Diakses pada 28 Maret 2021, dari <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>.

Planifolia, Vanilla (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, Edisi 1, April – September 2017.

Rachmat, Angga Nurdin (2017). Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat. *Jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017.

Rahawestri, M. A (2010). Obama's Foreign Policy in Asia: More Continuity than Change. *Security Challenges*, 6(1), 109–120. <http://www.jstor.org/stable/26459473>.

Reis, J (2014). China's Dual Response to the US 'Pivot'. *Asia Times*. Diakses pada 16 Juni 2022, dari <http://www.atimes.com/atimes/China/CHIN-01-240114.html>.

Richburg, Keith B (2011). U.S. pivot to Asia makes China nervous. *The Washington Post*, November 16. Diakses pada 14 Juli 2022, dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/us-pivot-to-asia-makes-china-nervous/2011/11/15/gIQAsQpVRN_story.html.

Ross, Robert S (2013). US Grand Strategy, the Rise of China, and US National Security Strategy for East Asia. *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 7, No. 2, ASIA-PACIFIC SPECIAL EDITION. 2013. Pp 20-40.

Schmidt, Johannes (2014). The Asia-Pacific Strategic Triangle: Unentangling the India, China, US Relations on Conflict and Security in South Asia. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 1, (2) 203–222.

Shambaugh, David (2013). Assessing the US "Pivot" to Asia [Journal]. *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 7, No. 2, ASIA-PACIFIC SPECIAL EDITION: Air University Press. Pp 10-19.

Singh, R (2012). *Barack Obama's post-American foreign policy: the limits of engagement*. Bloomsbury Publishing.

The Guardian (2011). Obama tells Asia US 'here to stay' as a Pacific power.

Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament/>

Trihartono, Agus, Indriastuti, Suyani & Nisya, Chairun (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publishing.

Wardhana, Agastya (2018). Grand Strategy Obama: Pivot to Asia. *Jurnal Global Strategis*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

Wilson, C and Clem Tidell (2003). Conflicts Over Natural Resources and the Environment: Economics and Security. The University of Queensland. Economics, Ecology, and The Environment. Working Paper No. 56, Figure 1, Pg. 6. September 2003. Diakses pada 30 April 2022, dari <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.570.4680&rep=rep1&type=pdf>.